BUKU I

Kementrian Lingkungan Hidup
Republik Indonesia

Dinas Lingkungan Hidup
Kota Magelang

RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KOTA MAGELANG TAHUN 2024

Disusun oleh:

Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)
Kota Magelang Tahun 2025

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RINGKASAN EKSEKUTIF

I. LATAR BELAKANG

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) merupakan laporan mengenai kondisi lingkungan hidup di suatu daerah yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pembuatan dokumen ini dilakukan oleh Tim Khusus yang dibentuk oleh Kepala Daerah, dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perguruan Tinggi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Keberadaan tim ini secara resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah.

Pemerintah Kota Magelang telah melakukan berbagai upaya pengelolaan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab dan respons terhadap permasalahan lingkungan yang ada. Upaya ini diwujudkan melalui pengembangan sistem informasi lingkungan hidup, yang berfungsi sebagai penyedia data sekaligus alat evaluasi untuk menentukan isu prioritas, memberikan rekomendasi kebijakan, dan mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan di Kota Magelang.

DIKPLHD Kota Magelang Tahun 2024 merupakan wujud nyata dari penerapan sistem informasi lingkungan hidup tersebut. Dokumen ini disusun secara terpadu dan terkoordinasi, kemudian dipublikasikan kepada masyarakat sebagai sarana penyedia data dan informasi lingkungan serta menjadi bagian dari pengawasan. Selain itu, dokumen ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Metode penyajian informasi dalam DIKPLHD menggunakan pendekatan DPSIR (Driving force, Pressure, State, Impact, and Response) untuk memberikan analisis yang komprehensif.

II. ANALISA DPSIR

1. Tata Guna Lahan

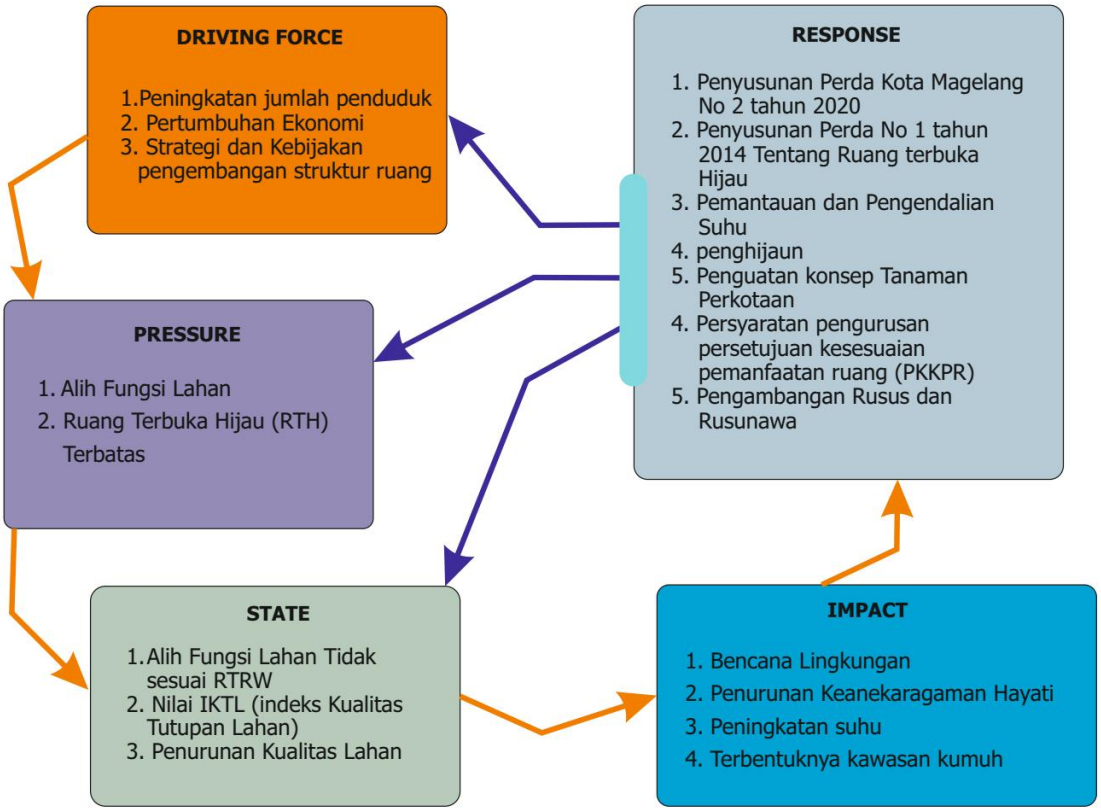

Analisa DPSIR Tata Guna Lahan

Kota Magelang merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 18,56 km². Kota Magelang terletak antara 110°12"30"- 110°12"52" BT (Bujur Timur) dan 7°26"18"- 7°30"9" LS (Lintang Selatan). Secara geografis Kota Magelang terletak di tengah-tengah Kabupaten Magelang, sehingga Kota Magelang berbatasan langsung dengan Kabupaten Magelang. Secara administratif Kota Magelang terbagi atas 3 Kecamatan dan 17 kelurahan. Penggunaan lahan di Kota Magelang didominasi oleh sektor non-pertanian di tahun 2024 mencapai 86,60% dan penggunaan lahan sawah

mencapai 5,69% dari keseluruhan luas wilayah Kota Magelang. Penggunaan untuk lahan kering sebesar 3,57%, hutan 3,77% dan badan air 0,37%.

Tata guna lahan di Kota Magelang mengalami perubahan karena didorong oleh peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, strategi dan kebijakan pengembangan struktur ruang. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2024 adalah 128.709 jiwa dengan pertumbuhan jiwa 0,35% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2023 sebesar 128.264 jiwa. *Driving force* ini diperkuat dengan *pressure* berupa alih fungsi lahan dan keterbatasan ruang terbuka hijau. Di Kota Magelang terdapat beberapa bangunan yang berada di kawasan yang tidak sesuai, akan tetapi belum ada identifikasi secara spasial di RTRW. Data dari DPUPR Kota Magelang berupa titik/sebaran (tidak konkret), yaitu:

- Pedagang kaki lima yang berada di luar kawasan binaan Pemerintah Kota Magelang (di sepanjang trotoar dan badan jalan).
- Pelanggaran sempadan dan bangunan liar di ruang irigasi sepanjang Kali Bening, Kali Progo Manggis, dan khusus di Sungai Elo terdapat bangunan *workshop* industri tahu yang berdempetan dengan sungai dan mendapat teguran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Beberapa bangunan yang sudah berdiri di tanah milik Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan memanfaatkan eks rel kereta api tanpa izin, mulai dari wilayah Kedungsari (utara) sampai daerah Trunan (selatan).

Hasil perhitungan IKL (indeks kualitas lahan) Kota Magelang tahun 2024 sebesar 35,88, naik dari angka indeks di tahun 2023 yang berada pada angka 27,85. Diperlukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Magelang yang merupakan bagian dari

tutupan vegetasi non hutan sehingga Indeks Kualitas Lahan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

Perubahan pada tata guna lahan ini menyebabkan terjadinya bencana lingkungan seperti tanah/ talud longsor, penurunan keanekaragaman hayati, peningkatan suhu, dan terbentuknya kawasan kumuh. Sebagai respon terhadap tata guna lahan, pemerintah Kota Magelang telah Menyusun Perda Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 disusun sebagai Perubahan Atas Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031, Penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ruang Terbuka Hijau, Pemantauan dan Pengendalian Suhu, penghijaun, Penguatan Konsep Tanaman Perkotaan, Pensyaratan pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Pembangunan Rusus dan Rusunawa.

2. Kualitas Air

Topografi Kota Magelang menyerupai punggung sapi, dimana sisi barat dan timurnya ketinggian tanahnya lebih rendah dibandingkan di bagian tengah. Sisi barat Kota Magelang terdapat Sungai Progo dan sisi timur terdapat Sungai Elo. Selain dialiri sungai, Kota Magelang juga memiliki saluran irigasi primer (Kali Bening dan Kali Manggis), sekunder (Kali Kota) dan tersier (Kali Gandekan, Kali Ngaran, dan Kali Kedali).

Peningkatan volume limbah rumah tangga dan limbah industry menjadi factor pemicu terhadap pencemaran air. Ditambah lagi dengan curah hujan, topografi, vegetasi dan pendangkalan sungai akibat sampah yang dibuang sembarangan menjadi *pressure* terhadap kualitas air.

Data tahun 2024, hasil uji kualitas air sungai terdapat beberapa parameter yang melebihi baku mutu seperti COD dan BOD. Sementara untuk hasil perhitungan indeks kualitas air (IKA) tahun 2024 adalah 58,33 turun dari angka tahun sebelumnya yaitu 66,67. Menaggapi hal tersebut, Pemerintah Kota

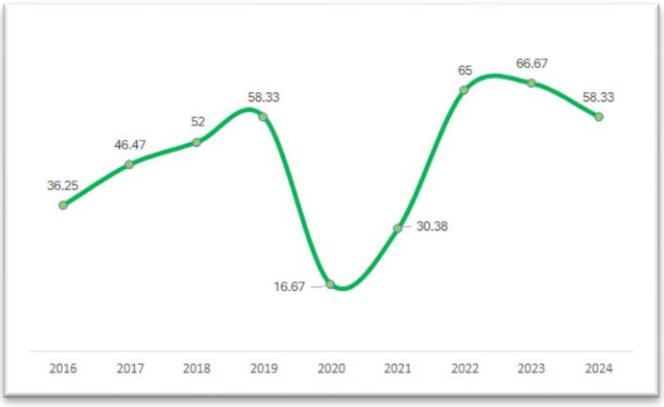

Magelang merespon dengan pemantauan kualitas air secara rutin, pengendalian kualitas air dan pengendalian pencemaran air seperti pembangunan SPALDT/S, pengolahan tinja perkotaan dengan IPLT, kewajiban penyusunan Pertek Pemenuhan BMAL, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha, pemberian disinfektan pada SPAM Komunal, lomba sanitasi, sosialisasi peningkatan kualitas lingkungan, pembuatan sumur resapan. Selain itu Pemkot Magelang telah membentuk tim monev partisipatif dan kerja sama dengan organisasi dan komunitas untuk peningkatan kualitas lingkungan.

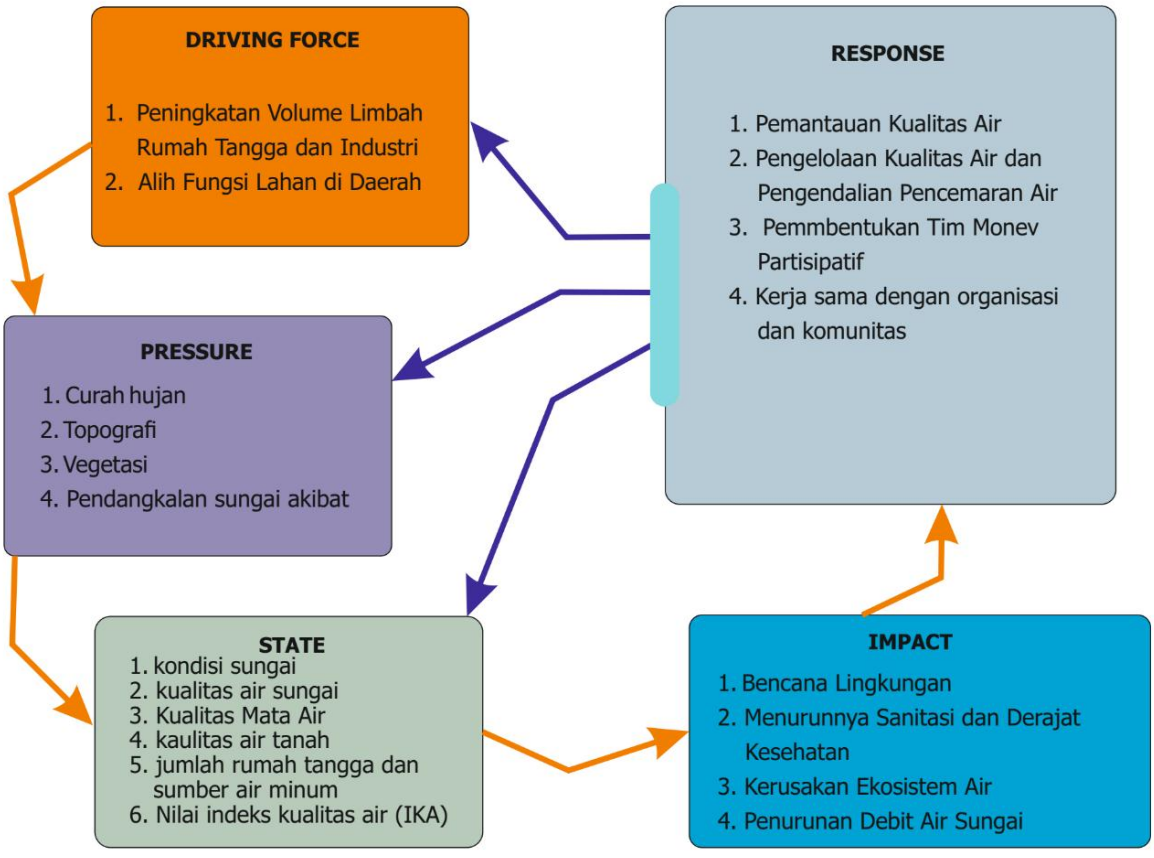

Analisa DPSIR Kualitas Air

3. Kualitas Udara

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, perubahan fungsi lahan, dan bencana alam merupakan factor pendorong pada kualitas udara di Kota Magelang. sementara faktor penekannya adalah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan adanya pertumbuhan sektor industry.

Hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tingkat konsentrasi SO_2 dan NO_2 di empat lokasi—kawasan transportasi, industri, pemukiman, dan perkantoran—menunjukkan hasil yang memuaskan. Data tersebut kemudian dianalisis untuk menghitung Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2024. Hasilnya, Kota Magelang mencapai IKU sebesar 86,83 pada tahun 2024, yang termasuk dalam kategori *sangat baik*. Selain itu, berdasarkan tren IKU dari tahun 2023 hingga 2024, terlihat adanya peningkatan nilai IKU pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

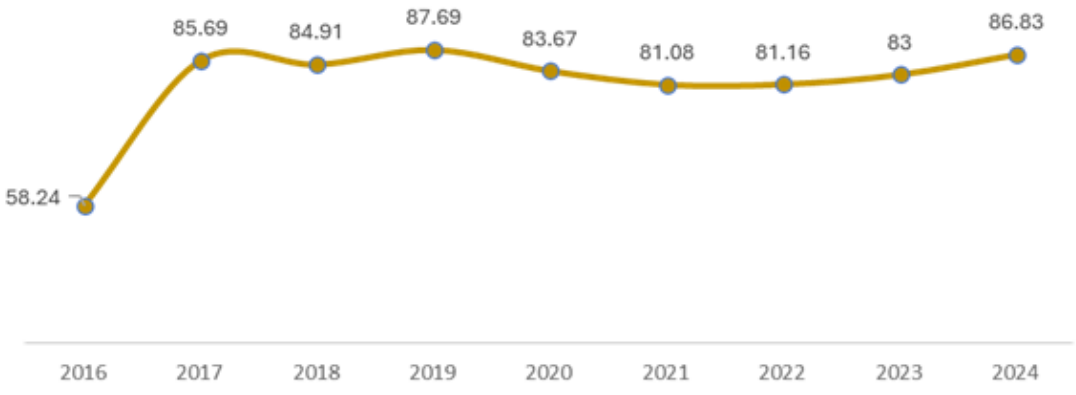

Grafik Nilai IKU Kabupaten Magelang Tahun 2016 - 2024

Sebagai upaya menjaga kualitas udara tetap baik, Pemerintah Kota Magelang melakukan pemantauan kualitas udara secara rutin, pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau, program kampung iklim, dan pengurangan emisi gas buang kendaraan bermotor.

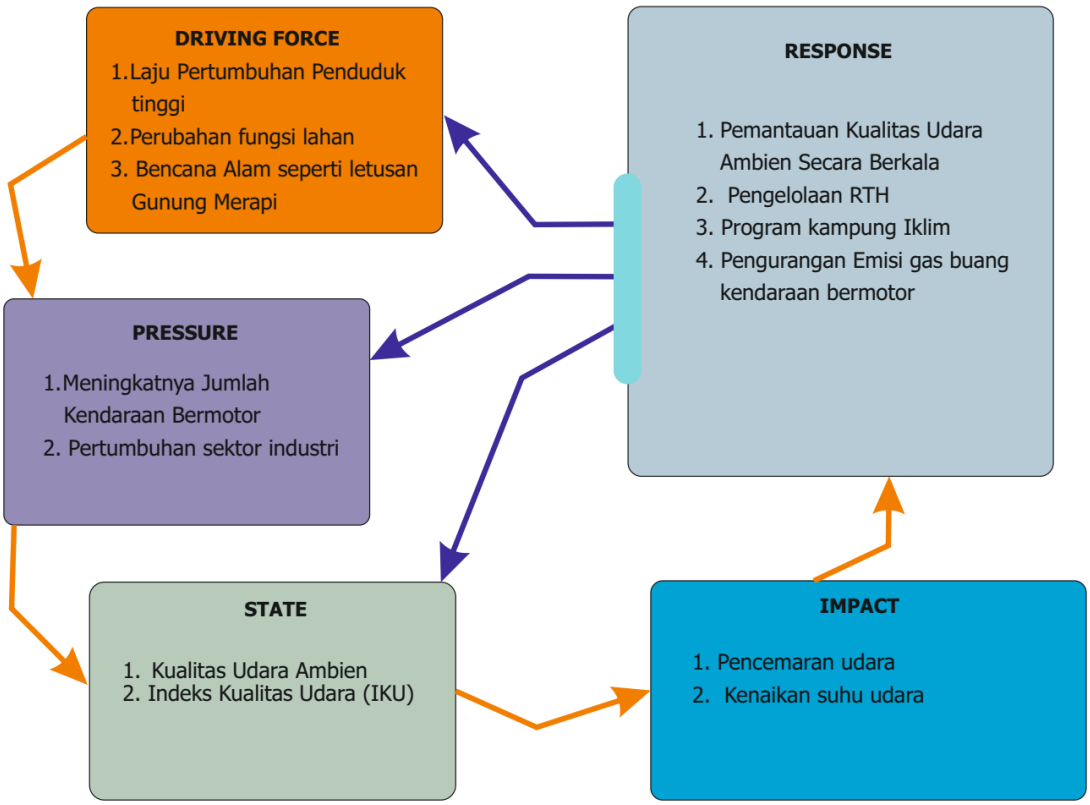

Analisa DPSIR Kualitas Udara

4. Risiko Bencana

Berdasarkan kondisi topografi, geologi, hidrologi, dan klimatologi Kota Magelang, perlu kewaspadaan terhadap bencana seperti longsor atau bencana lain khususnya pada daerah dengan kelerengan curam. Kondisi tanah longsor terutama disebabkan karena sebagian wilayah Kota Magelang termasuk dalam wilayah dengan tingkat kelerengan yang cukup tinggi. Pada musim penghujan ada beberapa wilayah di Kota Magelang yang rawan terjadi longsor, khususnya di bagian barat yaitu pada lereng-lereng yang cukup terjal di sepanjang Sungai Progo dan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Elo.

Sepanjang tahun 2024 terdapat 78 kejadian bencana di Kota Magelang yang meliputi 30 kasus ranting patah/batang patah/pohon tumbang, 11 kasus kebakaran rumah, 1 kasus laka air, 7 kasus atap/rumah roboh, 12 kasus tanah longsor/talud jebol, 15 kasus kebakaran lahan, 1 kasus ledakan gas LPG dan 1 kasus luapan saluran irigasi. Bencana yang terjadi tersebut menyebabkan kerugian ekonomi (material dan non material) dan kerusakan sarana publik.

Sebagai upaya menghadapi kebencanaan, Pemerintah Kota Magelang membentuk satuan BPBD, Pelatihan Penanggulangan Bencana untuk anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) dan unsur masyarakat, pembentukan pusdalops, Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Call Center 112, revkitalisasi penghijauan, pemeliharaan tanaman peneduh jalan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase.

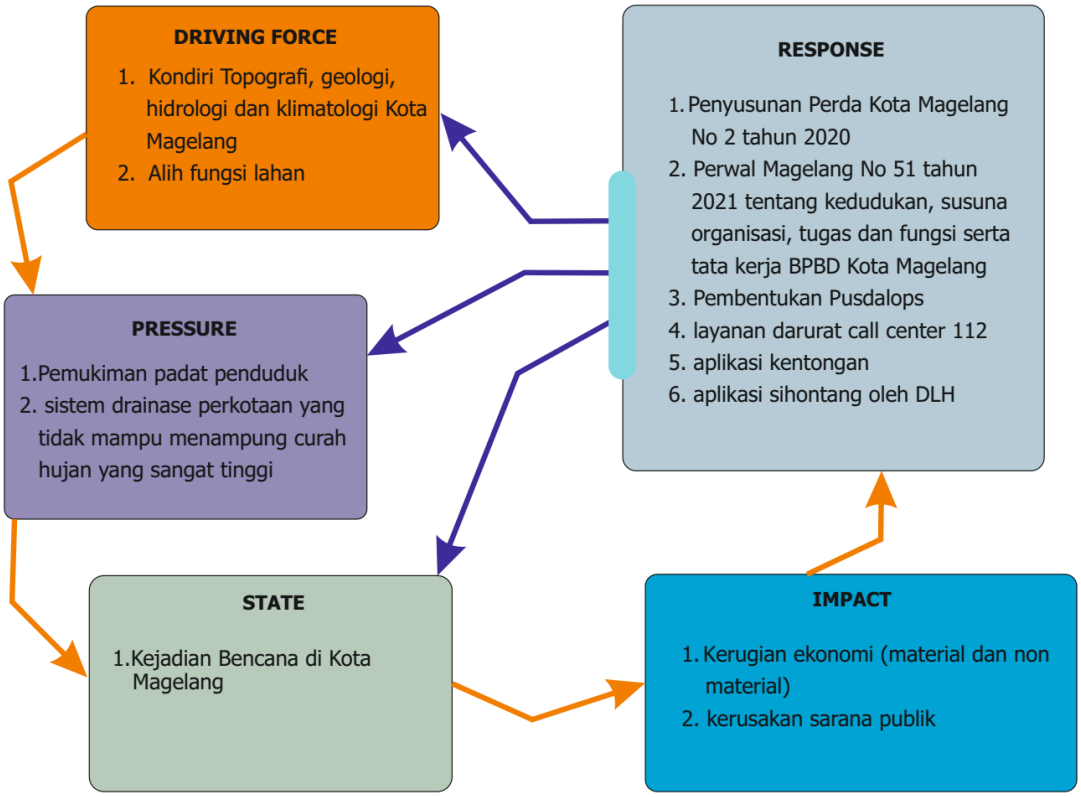

Analisa DPSIR Risiko Bencana

5. Perkotaan

Peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor pendorong atas permasalahan perkotaan di Kota Magelang. ditambah lagi dengan tingkat Pendidikan, tingkat kemiskinan, fasilitasi sanitasi layak dan peningkatan timbulan sampah menjadi penekan terhadap permasalahan yang ada.

Merujuk pada data dinas kependudukan dan catatan sipil, jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2024 adalah 128.709 jiwa dengan pertumbuhan jiwa 0,35%. Sementara untuk tingkat Pendidikan tertinggi penduduk Kota Magelang didominasi oleh jenjang SLTA Sederajat sebesar 33,07%. Adapun Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Kota Magelang tahun 2024 mencapai 7.250 orang (5,94%) berkurang jika dibandingkan dengan penduduk miskin 2023 yang tercatat sebesar 7.450 orang (6,11%). Garis kemiskinan Kota Magelang sebesar Rp. 626.614,- di tahun 2024.

Data BPS Provinsi Jawa Tengah (hasil Susenas) menyatakan bahwa pada tahun 2023 sebesar 89,42% rumah tangga di Kota Magelang memiliki fasilitas buang air besar milik sendiri, 7,8% menggunakan fasilitas buang air bersama rumah tangga tertentu dan 2,31% menggunakan MCK umum/MCK Komunal. Sementara itu masih terdapat 0,47% yang belum memiliki fasilitas BAB. Sarana fasilitas buang air besar ini penting sebagai indikator kemampuan masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

Respon yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang terhadap perkotaan antara lain pengendalian jumlah penduduk melalui penerapan program KB dan pencanangan kampung KB. Upaya lainnya adalah pengelolaan limbah cair atau sampah

yang dihasilkan melalui pembangunan SPALDS/T, Operasional IPLT, pengawasan dan pelaporan pencemaran atau perusakan lingkungan, penyediaan tempat sampah terpilah di fasilitas umum, kewajiban memiliki persetujuan lingkungan bagi pelaku usaha, kewajiban Menyusun rincian teknis limbah B3, pencanangan program adiwiyata, implementasi kampung teduh, pemanfaatan daur ulang sampah untuk hiasan taman kota. Selain itu, Pememrintah Kota melakukan peningkatan kualitas Kesehatan dengan cara Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, Penyelenggaraan penyehatan lingkungan, Pembinaan dan pendataan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan Mengikutsertakan penduduk Kota Magelang ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

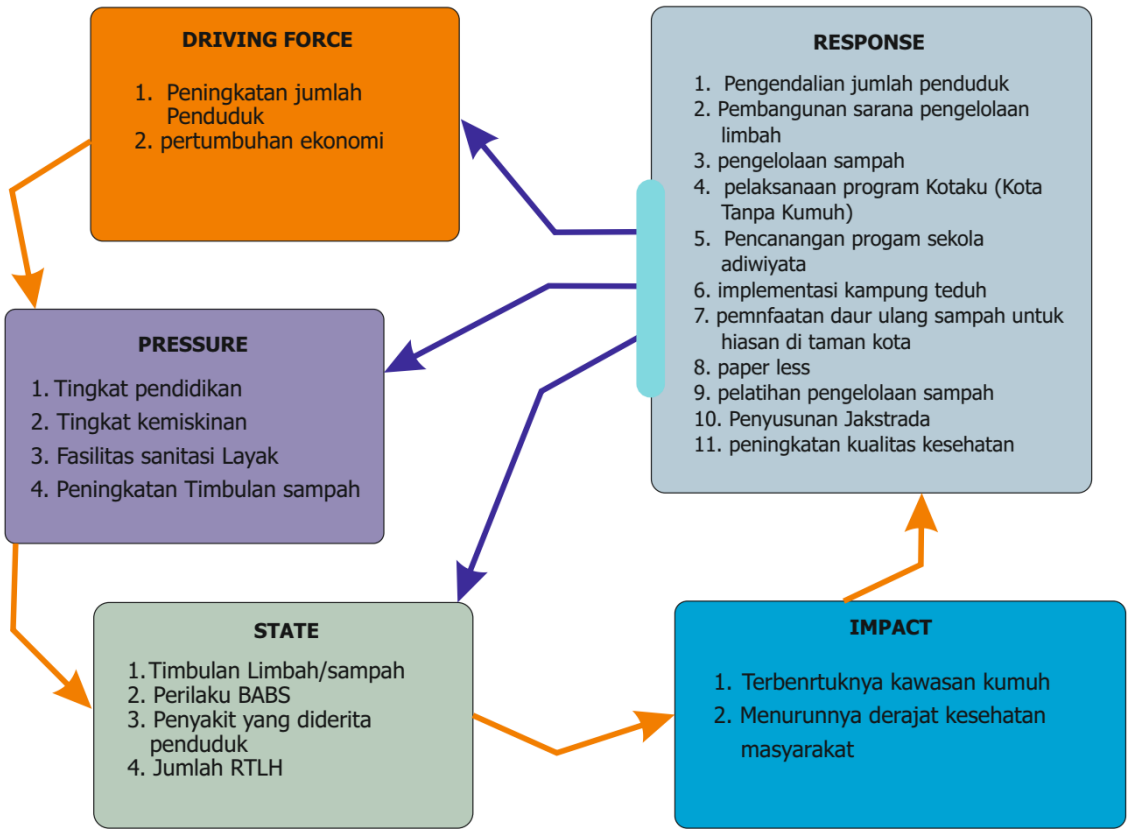

Analisa DPSIR Perkotaan

6. Tata Kelola

Driving force pada tata Kelola adalah perizinan lingkungan atau persetujuan lingkungan. Sementara yang menjadi *pressure* nya adalah adanya pelaku usaha yang belum memiliki izin, dan adanya pengaduan permasalahan lingkungan.

Berdasarkan data, Pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang mengeluarkan 3 persetujuan lingkungan dan rincian teknis limbah B3 sebanyak 6 usaha kegiatan. Adapun pengaduan permasalahan lingkungan yang diadukan ke Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 18 pengaduan meliputi pengaduan terkait ketidaknyamanan akibat sampah/limbah, pohon rawan tumbang, kebersihan jalan dan potensi luapan air. Semua progres pengaduan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang melalui kunjungan lapangan, dan mengundang pihak yang diadukan, pihak kelurahan setempat serta masyarakat yang terdampak untuk melaksanakan musyawarah mencari solusi yang baik agar pencemaran yang dikeluhkan warga tidak terjadi lagi.

Tata Kelola Pemerintah Kota Magelang dalam menangani lingkungan berdampak pada penghargaan lingkungan yang diberikan baik dari Provinsi Jawa Tengah maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat 17 penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh Kota Magelang tahun 2024. Penghargaan lingkungan hidup yang diraih Kota Magelang tahun 2024 meliputi 2 Proklim Utama, 6 Proklim Madya, 6 Adiwiyata Tingkat Provinsi dan 3 Adiwiyata Tingkat Nasional. Serta penghargaan UI *Green City Metric* 2024 Kategori Kota Peningkatan Berkelanjutan Terbaik.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang agar tata Kelola pemerintahan terus berkomitmen menjaga dan mengelola lingkungan

hidup dengan baik antara lain pemantauan persetujuan lingkungan, Pembentukan Produk Hukum Lingkungan Hidup yang di tahun 2024 terdapat produk hukum Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045. Upaya lainnya adalah Penguatan Anggaran Lingkungan Hidup di Kota Magelang dengan Jumlah anggaran pengelolaan lingkungan hidup di tahun 2024 naik 36% yaitu sebesar Rp. 45.760.139.570,00.

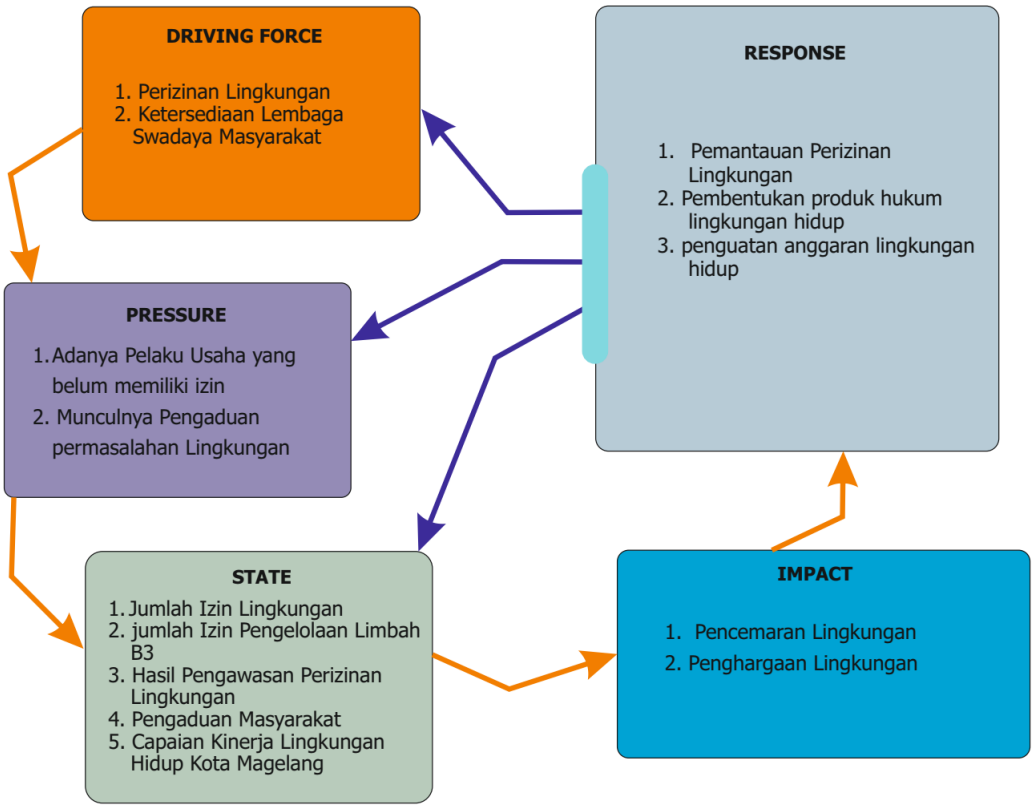

Analisa DPSIR Tata Kelola

III. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan isu prioritas lingkungan hidup daerah Kota Magelang dirumuskan melalui proses partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan di Kota Magelang dengan menganalisis faktor tekanan, kondisi eksisting, dampak yang ditimbulkan serta respon (pendekatan DPSIR yaitu *Driving Force, Pressure, State, Impact,* dan *Response*) pada beberapa aspek lingkungan hidup di Kota Magelang yang mencakup (1) tata guna lahan; (2) kualitas air; (3) kualitas udara; (4) resiko bencana; (5) perkotaan; dan (6) tata kelola, serta mencermati tren IKLH dalam lima tahun terakhir.

Kriteria yang dijadikan isu prioritas adalah: (1) Pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup; dan (2) Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgent), (3) mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen); dan (4) berdampak signifikan terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup.

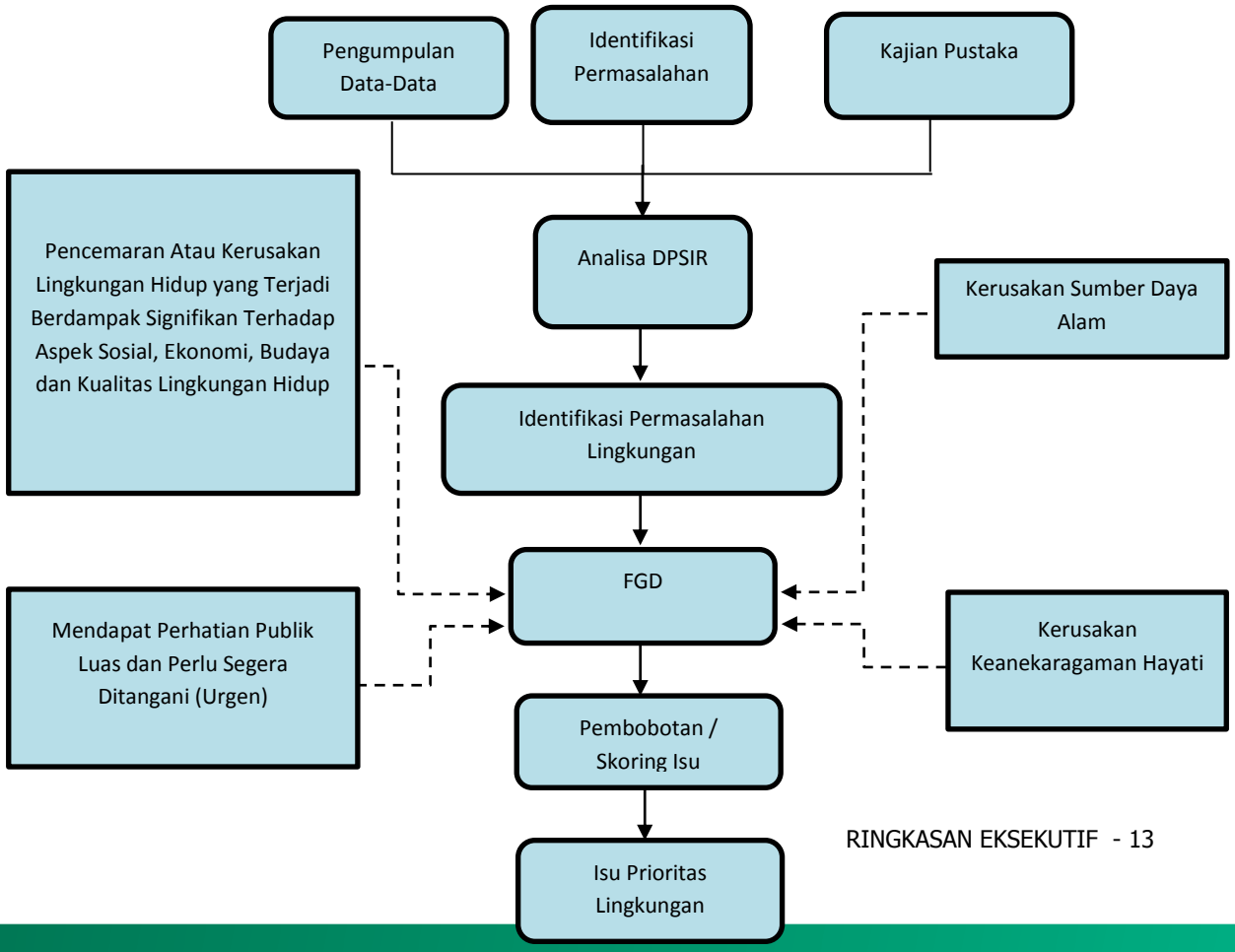

Diagram Alir Proses Penetapan Isu

Hasil dari *Focus Group Discussion* pengelompokkan isu strategis yang akan diangkat di dalam DIKPLHD Kota Magelang tahun 2024 dihasilkan daftar isu strategis lingkungan hidup sebagai berikut:

1) Pencemaran Air
2) Risiko Bencana dan Perubahan Iklim
3) Persampahan
4) Perubahan Fungsi Lahan
5) Tata Kelola Kelembagaan
6) Ketersediaan Infrastruktur
7) Kuantitas Air

Selanjutnya dilakukan penilaian untuk masing-masing isu tersebut. Hasil rekapitulasi nilai terdapat 5 isu prioritas lingkungan hidup di Kota Magelang yaitu:

1) Prioritas 1 : Persampahan (jumlah skor: 284)
2) Prioritas 2 : Pencemaran Air (jumlah skor: 257)
3) Prioritas 3 : Kuantitas Air Bersih (jumlah skor: 227)
4) Prioritas 4 : Perubahan Fungsi Lahan (jumlah skor: 225)
5) Prioritas 5 : Risiko Bencana dan Perubahan Iklim (jumlah skor: 201)

Isu Prioritas Lingkungan Hidup tersebut diatas selanjutnya ditetapkan oleh Wali Kota Magelang melalui surat pernyataan dan ditandatangani oleh Wali Kota Magelang.

IV. INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Inovasi daerah Pemerintah Kota Magelang dalam mengatasi berbagai isu prioritas dalam pengelolaan lingkungan tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel Matriks Inovasi Daerah dan Isu Prioritas Lingkungan Hidup

NO	INOVASI DAERAH	ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024				
		Persam-pahan	Pence-maran Air	Kuantitas Air Bersih	Perubahan Fungsi Lahan	Risiko Bencana dan Perubahan Iklim
1	Perda Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang 2011-2031			V	V	V
2	Perda Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2023 tentang perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	V	V	V	V	V
3	Peraturan Wali Kota No 99 tahun 2021 tentang Pemanfaatan Air Hujan			V		V
4	Kajian Kerentanan Sumber Daya Air dan Perubahan Iklim		V	V		
5	SELAPAH (Sekolah Pengelolaan Sampah)	V	V			
6	Sistem Pengolahan Lindi (SIPENDI) dengan metode siklus hidrosfer	V	V			
7	*Wetland* Filter untuk peningkatan kualitas air		V	V		

NO	INOVASI DAERAH	ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024				
		Persam-pahan	Pence-maran Air	Kuantitas Air Bersih	Perubahan Fungsi Lahan	Risiko Bencana dan Perubahan Iklim
8	SIMTON (sistem informasi timbangan online)	V				
9	Pelayanan Perawatan pohon					V
10	Edu Proklim	V	V	V	V	V
11	Mas Pandu (mekanisme dan pelayanan edu wisata) kebun raya gunung tidar kota magelang			V		V
12	Pengelolaan IPAL Tahu		V			
13	Jalak Kebo (Limbah Tinja untuk lahan kebun organik)				V	V
14	UDA SANI ke Magelang		V			
15	Aplikasi "Si Bunda"				V	
16	ZAMP (ZONA AIR SIAP MINUM)		V			
17	Kampung Teduh (Kampung Tematik, Terpadu, dan Hijau)	V	V			
18	SIBOTA (Sistem Informamsi Botani)				V	V
19	SIMPEL (Sistem Pemakaman Online)				V	
20	SABUN KENCANA					V
21	Fitoremediasi Menggunakan Tanaman Kayu Apu (*Pistia stratiotes*)		V			
22	SOSIS BLUTHUK (Sosialisasi Blusukan Turut Kelurahan)					V
23	SIHAB (Sistem Informasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi)					V
24	LAPOR DAMKAR SEMUA LANCAR		V		V	
25	PAS SUPER				V	

Sumber: Analisa Tim Penyusun, 2025

1. **Perda Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang 2011-2031**

   Perubahan peraturan daerah ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan tata ruang agar lebih relevan dengan perkembangan pembangunan serta tuntutan pengelolaan ruang yang berkelanjutan. Revisi yang dilakukan diharapkan dapat lebih responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah tersebut.

2. **Perda Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2023 tentang perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

   Perda sebelumnya No. 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga diperlukan pembaruan untuk menjamin kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan masyarakat perlu adanya pengaturan mengenai upaya pengendalian yang menyelaraskan kemudahan perizinan berusaha dengan dampak dari kegiatan serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

3. **Peraturan Wali Kota No 99 tahun 2021 tentang Pemanfaatan Air Hujan**

   Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi penanggung jawab bangunan dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan air hujan sebagai upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya air hujan dengan tujuan untuk mengurangi genangan air atau banjir serta mempertahankan kualitas dan meningkatkan kuantitas air tanah.

4. Kajian Kerentanan Sumber Daya Air dan Perubahan Iklim

Kajian ini dilakukan atas kerjasama Bappeda, IUWASH Tangguh, PDAM Kota Magelang, DLH, Puskesmas/ Labkes, DLH, dan AKATIRTA. Kegiatan yang dilakukan berupa survei identifikasi dan pengukuran debit mata air yang ada di Kota Magelang. Dari hasil survei teridentifikasi 42 titik mata air tersebar di seluruh Kota Magelang dengan sebagian besar debit mata air < 1 liter/detik. Kajian ini menjadi respon terhadap isu prioritas kuantitas air bersih.

5. SELAPAH (Sekolah Pengelolaan Sampah)

SELAPAH merupakan upaya optimalisasi metode pelatihan dan edukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sebelum adanya SELAPAH, pelatihan pengelolaan sampah hanya melibatkan perwakilan dan tidak memiliki kurikulum yang terstruktur. Dengan adanya SELAPAH, pelatihan pengelolaan sampah kini lebih menyeluruh dan terintegrasi (meliputi pengelolaan dari hulu hingga hilir), berbasis wilayah RT/RW, serta didukung pendampingan intensif pasca pelatihan.

6. Sistem Pengolahan Lindi (SIPENDI) dengan Metode Siklus Hidrosfer

Inovasi ini dalam bentuk *prototype* untuk pengolahan air lindi di TPSA Banyuurip. Metode yang digunakan untuk sistem pengelolaan air lindi yaitu memanfaatkan siklus hidrologi untuk mengurangi volume dan

memproses air lindi secara alami. Inovasi ini menjadi respon atas isu prioritas pencemaran air dan persampahan.

7. *Wetland* Filter untuk Peningkatan Kualitas Air

Inovasi pengolahan air berbasis ekosistem lahan basah buatan diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang di SMP Negeri 6. Teknologi ini meningkatkan kualitas air melalui proses alami filtrasi oleh tanaman dan substrat. Air mengalir ke bagian bawah *wetland* filter, lalu naik melalui kerikil dan akar tanaman, yang menyaring air. Batuan dan mikroba yang menempel pada batuan dan tanaman mengurangi kandungan zat pencemar, menyaring partikel solid sehingga air menjadi lebih jernih dan dimanfaatkan untuk kolam ikan. Inovasi ini menjadi solusi penanganan pencemaran air dan kuantitas air bersih.

8. SIMTON (Sistem Informasi Timbangan *Online*)

SIMTON adalah sebuah inovasi digital dalam sistem pengelolaan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan sampah di lingkungan UPT TPSA. Sistem ini dirancang untuk mengatasi berbagai hambatan yang sering terjadi dalam proses penimbangan, pencatatan, hingga pelaporan jumlah sampah yang masuk ke TPSA. Melalui penerapan SIMTON, proses pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan secara otomatis, daring, dan berlangsung secara waktu nyata *(real-time).*

9. Pelayanan Perawatan Pohon

Inovasi ini merupakan upaya pencegahan terhadap potensi bencana pohon tumbang. Layanan ini mencakup perawatan dan pemeriksaan kesehatan pohon, serta konsultasi bagi masyarakat mengenai kondisi pohon di lingkungan mereka. Pelayanan diberikan secara terjadwal setiap hari Sabtu,

berdasarkan urutan permohonan yang masuk, dan dikhususkan bagi warga Kota Magelang. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan publik dan menjaga kelestarian pohon di wilayah kota.

10. Edu Proklim

Merupakan inovasi untuk membangun kampung ramah lingkungan dan berkelanjutan. Di Kota Magelang, Proklim Cacaban menjadi contoh nyata berhasil dalam menciptakan lingkungan ramah iklim melalui pengelolaan sampah, penghijauan, konservasi air, dan peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat. Pengembangan Proklim juga berdampak pada ekonomi dan sosial seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

11. Mas Pandu (Mekanisme dan Pelayanan Edu Wisata) Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang

Mas Pandu adalah inovasi pelayanan publik dari UPT Kebun Raya Gunung Tidar untuk meningkatkan layanan eduwisata. Inovasi ini mendukung misi Kota Magelang dalam penguatan ekonomi lokal, pengembangan kawasan strategis, dan digitalisasi layanan publik. Keunggulannya meliputi pendaftaran kunjungan *online* dengan jadwal *realtime*, penyampaian materi oleh petugas kompeten, pendampingan medis untuk keamanan, serta pendampingan media sebagai dokumentasi.

12. Pengelolaan IPAL Tahu

Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah membangun IPAL Tahu di sentra industri tahu di lahan seluas 500 m^2. IPAL dibangun untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat operasional industri tahu di Kampung Tidar Campur, Kelurahan Tidar Selatan. Setiap harinya dihasilkan sekitar 50.000 L limbah cair tahu, sebelumnya langsung

dibuang ke sungai sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan mencemari sungai.

13. Jalak Kebo (Limbah Tinja untuk lahan kebun organik)

Jalak Kebo merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Magelang, yang mengolah limbah tinja menjadi pupuk organik untuk mendukung pertanian ramah lingkungan di wilayah setempat. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi pencemaran lingkungan tetapi juga mendukung produksi pertanian organik yang sehat dan berkelanjutan.

14. UDA SANI ke Magelang

Uda Sani merupakan aplikasi untuk mengoptimalkan pendataan sanitasi. Sebelum inovasi ini, data disimpan secara konservatif dalam *soft file* di laptop/PC. Kelebihannya tidak memerlukan internet namun rawan hilang jika terdapat *error* pada perangkat maupun pengelolanya serta lokasi akses terbatas karena tidak dilakukan *back up* di semua perangkat. Adanya inovasi ini, data sanitasi lebih aman dan bisa diakses dari mana saja. Inovasi ini berupa Sistem Informasi Geografi Data Sanitasi, yakni peta sebaran kondisi sanitasi di Kota Magelang. Baik buruknya kondisi sanitasi ditunjukkan dengan titik berwarna sesuai klasifikasinya.

15. Aplikasi "Si Bunda"

DPUPR Kota Magelang membuat inovasi aplikasi Si Bunda untuk memudahkan sinkronisasi antara bangunan dan data. Seiring berjalannya waktu dan pergantian personil perizinan, penyimpanan arsip bisa berpindah tangan, terutama saat pembangunan atau renovasi gudang penyimpanan seperti gedung baru DPUPR. Kurangnya staf terlatih juga bisa memperlambat proses rekomtek PBG dan meningkatkan kesalahan administrasi. Aplikasi "Si Bunda", mengatasi masalah ini dengan sistem digital dengan mengintegrasikann data IRK berupa bidang-bidang

berdasarkan sertifikat tanah. Tahapannya mencakup *overlay* fitur di atas fitur lainnya.

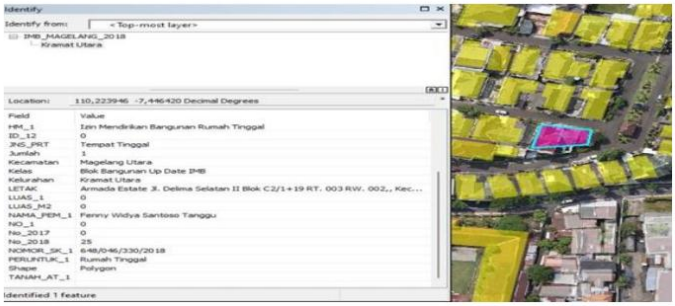

Tampilan Aplikasi Si Bunda

16. ZAMP (ZONA AIR MINUM PRIMA)

ZAMP adalah wilayah pelayanan khusus air siap minum, yaitu air yang disalurkan sudah memenuhi syarat untuk bisa diminum langsung tanpa harus dimasak. Program ini merupakan kerja sama IUWASH Tangguh, PDAM Kota Magelang, dan AKATIRTA dalam pembentukan dan pembangunan ZAMP. Pelayanan air minum ini meliputi kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Kualitas air di ZAMP PDAM dipantau secara berkala melalui analisis laboratorium.

Wali Kota Bersama Warga Minum Air dari ZAMP

17. Kampung Teduh (Kampung Tematik, Terpadu, dan Hijau)

Inovasi ini untuk menata kawasan permukiman agar lebih bersih, nyaman, dan layak huni. Tujuannya mencakup pengentasan kawasan kumuh, peningkatan kualitas lingkungan hunian, serta pemberdayaan ekonomi

masyarakat melalui partisipasi aktif dalam mengembangkan potensi lokal. Program ini dijalankan antara pemerintah dan masyarakat, didukung infrastruktur dan pemberdayaan sosial. Kelurahan Panjang ditetapkan sebagai proyek percontohan.

18. SIBOTA (Sistem Informamsi Botani)

SIBOTA adalah inovasi digital yang menyajikan informasi jenis dan karakteristik tanaman di Kebun Raya Gunung Tidar, Kota Magelang. Disajikan melalui label tanaman ber-QR *Code* yang terhubung ke *website* atau *blog* Kebun Raya, berisi penjelasan lengkap tiap tanaman. Hingga kini, telah terpasang sekitar 32 label tanaman. Inovasi ini mendukung fungsi edukatif kebun raya dan juga memberikan informasi yang mudah diakses.

19. SIMPEL (Sistem Pemakaman *Online*)

SIMPEL merupakan inovasi layanan digital dari Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang diterapkan di TPU Giriloyo sejak 29 Mei 2020. Layanan ini mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi pemakaman secara daring melalui *website*, mencakup perizinan pemakaman, perpanjangan izin, pemesanan, serta perizinan makam tumpangan. SIMPEL juga memberikan kemudahan dalam hal pemantauan status permohonan, pengecekan progres perizinan, serta notifikasi masa berlaku sewa makam.

20. SABUN KENCANA

Sekolah Aman Bencana adalah sebuah inovasi pendidikan dan kesiapsiagaan yang bertujuan menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana, baik bencana alam

maupun non-alam. Program ini merupakan kerjasama antara BPBD dengan satuan pendidikan di Kota Magelang dengan melibatkan seluruh warga sekolah, guru, siswa, tenaga kependidikan, dan orang tua dalam menciptakan lingkungan belajar yang siaga dan responsif terhadap risiko bencana.

21. Fitoremediasi Menggunakan Tanaman Kayu Apu *(Pistia stratiotes)*

Metode Fitoremediasi yaitu penggunaan tanaman untuk mengurangi polutan di lingkungan, dan dalam penelitian ini menggunakan tanaman kayu apu untuk menurunkan kadar BOD, COD, dan TSS.

22. SOSIS BLUTHUK (Sosialisasi Blusukan Turut Kelurahan)

Merupakan program yang diinsiasi oleh BPBD Kota Magelang, berupa sosialisasi langsung ke warga terutama di area yang rawan bencana sehingga tepat sasaran. Kegiatan dilaksanakan dalam waktu 1 hari untuk tiap lokasi daerah rawan bencana. Inovasi ini dilakukan secara kolaboratif antara BPBD, masyarakat setempat, OPD terkait, dan organisasi kemasyarakatan. Inovasi ini menjadi salah satu upaya terhadap isu prioritas risiko bencana dan perubahan iklim.

23. SIHAB (Sistem Infomasi Rehabiltasi dan Rekonstruksi)

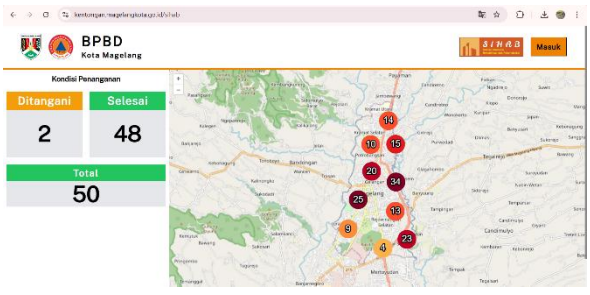

Merupakan aplikasi kebencanaan yang berfungsi untuk memantau progres rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan korban bencana. SIHAB dapat diakses oleh instansi terkait dalam hal kebutuhan penanganan pasca bencana maupun oleh masyarakat sebagai salah satu media pengawasan dalam mendorong penyelesaian penanganan

pasca bencana. Aplikasi ini didukung dalam bentuk pengawasan sehingga diharapkan akan meningkatkan kinerja OPD/Instansi.

24. Lapor Damkar Semua lancar

Inovasi dari UPT Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan waktu respon pemadaman dan penyelamatan saat kejadian kebakaran melalui inovasi LAPOR DAMKAR SEMUA LANCAR dengan meenggunakan aplikasi *Whatsapp*. Sebelumnya, laporan menggunakan telepon tidak dapat langsung menunjukkan titik lokasi kejadian, sehingga menyulitkan petugas. Dengan inovasi ini dari pihak pelapor maupun petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan sangat terbantu untuk menuju titik lokasi.

25. PAS SUPER (Pengamanan Aset PSU Perumahan)

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pengembang ke pemerintah daerah diatur dalam Pasal 26 Perda Kota Magelang Nomor 8. Inovasi ini untuk mengumpulkan dasar/alas hak dalam pengajuan pensertifikatan jalan lingkungan/PSU atas nama Pemkot Magelang sebagai dasar pemeliharaan dan peningkatan kualitas PSU serta dapat mencegah sengketa, penyalahgunaan dan perubahan fungsi PSU.

V. RENCANA TINDAK LANJUT

Berikut ini adalah rencana tindak lanjut Pemerintah Kota Magelang dalam pengelolaan lingkungan hidup.

1) Menjadikan isu prioritas terkait lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan di Kota Magelang.

2) Berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai pengelolaan lingkungan pada wilayah yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Magelang seperti pengelolaan sungai dan saluran irigasi.
3) Menambah anggaran bidang pengelolaan lingkungan hidup seiring dengan semakin berkembangnya kompleksitas permasalahan lingkungan.
4) Melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumber daya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan.
5) Menambah produk hukum bidang lingkungan hidup dan berkomitmen dalam implementasi produk hukum yang telah ditetapkan.
6) Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan meningkatkan peran serta swasta melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Magelang.
7) Melaksanakan program unggulan Wali Kota Magelang terpilih periode 2025 – 2029 antara lain:
    a. Prodamai; program pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur 50 juta/RT
    b. Sahabat usaha; berupa bantuan usaha bagi masyarakat miskin yang berusaha sebanyak 40 juta per RW
    c. Berdikarikan disabilitas; fasilitasi pelatihan kewirausahaan dan penempatan kerja bagi difabel
    d. Hunian nyaman; pembangunan hunian dan rehab RTLH
    e. Z-Hub; wadah anak muda berkarya
    f. Pelayanan untuk warga miskin; pelayanan terpadu untuk pelayanan warga tidak mampu
    g. Harapan Magelang; pemberian beasiswa dan pendidikan vokasi
    h. Anak merdeka; pencegahan kekerasan anak, mengurangi kasus perkwainan anak dan mengatasi stunting

i. Perempuan berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera; fasilitasi bagi perempuan lansia
j. Angkot pelajar gratis; fasilitas antar jemput pada jam berangkat dan pulang sekolah
k. Dana wibawa kecamatan dan kelurahan; dana operasional camat dan lurah apabila terjadi bencana
l. KTP-Ku; kemudahan bagi warga berKTP Kota Magelang untuk BPJS dan sebagainya
m. Makclinge (Magelang *Cleansheet*); pengelolaan sampah dengan pendekatan baru
n. Puskesmas-RS pagi sore; penambahan jam operasional Puskesmas – RS pagi dan sore
o. *Homecare* Pusling; bagi disabilitas dan lansia *immobile*
p. RS tanpa dinding; penerapan telemedisin, *smart hospital* dan pusat edukasi di RSUD Tidar
q. Hospital *tourism*; pengobatan dan pemulihan kesehatan dibarengi dengan kegiatan wisata
r. RS Prorakyat; peningkatan kesehatan khusus KJSU: kanker, jantung, stroke, uro nefrologi
s. Aplikasi kesehatan memudahkan rakyat; aplikasi kemura layanan kesehatan terintegrasi